

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

(Studi Kasus Putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks)



OLEH:

HERWINDAH ANNISAH

B111 13 001

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT**

(Studi Kasus Putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

HERWINDAH ANNISAH

B 111 13 001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan Nomor 684/Pid.B/2016/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

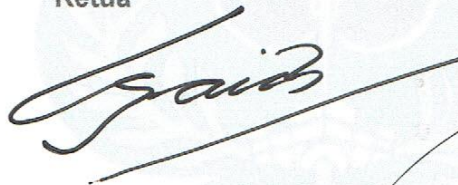
HERWINDAH ANNISAH

B11113001

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari senin, 2 Juni 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

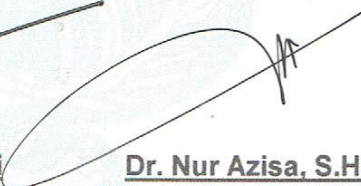
Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si

NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris

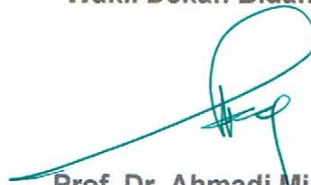


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SEMINAR SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Herwindah Annisah

Nomor Pokok : B111 13 001

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan

No.684/Pid.B/2016/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar skripsi

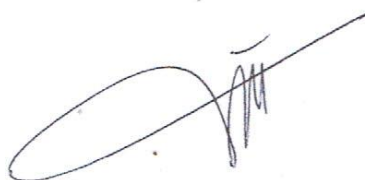
Makassar, Mei 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP.19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H., MH
NIP.19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : HERWINDA ANNISAH |
| Nomor Pokok | : B11113001 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No.684/Pid.B/2016/PN.Mks) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2017



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmad Miru SH.,MH
NIK 196106071986011 003

ABSTRAK

Herwindah Annisah (B111 13 001) “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat” (Studi Kasus Putusan Nomor 684/ Pid.B/ 2016/ PN.Mks). Dibimbing oleh Said Karim sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 684/ Pid.B/ 2016/ PN. Mks dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman sebagaimana dalam Putusan Nomor 684/ Pid.B/ 2016/ PN. Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara hakim sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.

Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung. Putusan hakim yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dengan adanya dua alat bukti yang sah (2) pertimbangan oleh mejelis hakim di hadapan pengadilan dalam mengambil keputusan mencerminkan keadilan kepada semua pihak khususnya kepada para terdakwa, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan alat-alat bukti sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (studi kasus putusan No.684/Pid.B/2016/PN.Mks)” sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Rampungnya skripsi ini, penulis persembahkan untuk orang tua tercinta ayahanda Ir. Darwin Djabir, M.Si dan Ibunda tercinta Ir. Zulhenny Amal M.Dev.Plg yang tidak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, memberi semangat serta senantiasa mendoakan penulis. Terima kasih kepada kakakku Dani Hadiyanto, yang selalu bersedia ketika penulis meminta bantuan, serta adikku Winny Amanda yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.

Dari lubuk hati penulis juga haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan Para Wakil Rektor dan seluruh jajaran stafnya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi SH,. M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., serta Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H.,M.Si. selaku Penasehat Akademik atas segala bimbingan dan perhatiannya yang telah diberikan kepada penulis, dan kepada para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis. Serta kepada para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak H. Cakra Alam, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar serta Ibu Rika M. Pandegirot, S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan informasi terkait dalam penelitian penulis.
7. Kepada saudara-saudaraku Ihsan Jani , S.H., dan Irwanto Eka Putra yang sudah membantu dan memberikan motivasi untuk penulis dalam meranmpungkan skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudaraku di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dian Eka Putri Ismail, S.H., Nidaul Hasanah, S.H., Fajriah Rezeki, S.H., Risma Nur Hijriah S.H., Athirah Maulidina S.H., Ratu Parenrengi, Ririn Adrini dan teman-teman lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, sungguh mengenal kalian semua adalah anugerah, semoga kebersamaan dan keakraban kita tidak hanya sebatas di Universitas Hasanuddin.
9. Teman KKN Gelombang 82 Universitas Hasanuddin di Kecamatan Sabbangparu khususnya posko Kelurahan Sompe, Algifar, Andi Harun,

Andi Muhammad Fathir, Esa, Fadhil Wardihan, Hiba, Suna, Tiwu, dan Wira atas segala kebaikan serta pengalaman yang banyak selama KKN

10. Teman-teman Asrama Putri Siti Narmita S.E., Dija S.H., Andi Putri Yasni S.H., Andi Resky Noviana terima kasih waktu yang diluangkan untuk penulis selama ini
11. Teman-teman Andi Nurul Fadilah, Asriani, Auliah Indah Sari, Dian Juliarsih, terima kasih sudah berjuang bersama-sama di fakultas hukum Unhas
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan Rahmat dan Berkah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengemban wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|----------|
| Halaman Judul | i |
| Pengesahan Skripsi | ii |
| Persetujuan Pembimbing | iii |
| Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi | iv |
| Abstrak | iv |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Tinjauan Yuridis..... | 8 |
| B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana..... | 8 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 8 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 10 |
| C. Pemalsuan Surat..... | 13 |
| 1. Pengertian Pemalsuan Surat..... | 13 |
| 2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat..... | 16 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat..... | 18 |
| D. Pidana dan Pemidanaan..... | 24 |
| 1. Pengertian Pidana..... | 24 |
| 2. Pengertian Pemidanaan..... | 26 |
| 3. Teori-Teori Pemidanaan..... | 26 |
| E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 40 |
| B. Jenis Dan Sumber Data..... | 41 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
| A. Penerapan Hukum Pidana Materil..... | 44 |
| 1. Posisi Kasus..... | 45 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 47 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 57 |
| 4. Amar Putusan..... | 58 |
| 5. Analisis Penulis..... | 60 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan..... | 69 |
| 1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan..... | 69 |
| 2. Analisis Penulis..... | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 74 |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia maupun sekelompok manusia. Adapun tujuan dari kaedah hukum adalah terciptanya ketertiban masyarakat. Apabila kepentingan manusia itu terlindungi, maka kaedah masyarakat akan tertib.

Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.¹

Tindak pidana berupa pemalsuan surat atau data ketentuannya ada dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 KUHP. R Soesilo dalam bukunya mengatakan, bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain-lainnya.²

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang,

¹Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 12.

² R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 195.

perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya)’

3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacamitu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:³

- 1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- 2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- 4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.

³*Ibid.*, hlm. 195.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijkopmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHP.

Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai sebuah surat misalnya KTP, sehingga menghasilkan sebuah KTP. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang

melakukan wujud tersebut, berikut kapan (temposnya) dan dimana (lokusnya) semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan. Tidak cukup adanya fakta kedapatan pada seseorang, atau digunakan sebagai bukti identitas menginap di sebuah hotel. Dalam Hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan sekutidak-tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim.

Pasal 183 KUHAP tentang syarat minimal pembuktian, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, ialah syarat subjektif yang dilandasi syarat objektif. Harus ada keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Tiga keyakinan hakim yang dibentuk atas dasar (objektif) minimal 2 alat bukti yang sah tersebut, ialah hakim yakin tindak pidana terjadi, hakim yakin terdakwa melakukannya dan hakim yakin terdakwa bersalah.

Menurut Adam Chazawi:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak

dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”⁴

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, dalam skripsi ini Penulis mengambil judul dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 684/Pid.B/2016/PN.Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dipaparkan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dalam putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penelitian ini adalah :

⁴AdamiChazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dalam putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

1. Secara Akademis atau Teoritis

Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu Hukum pidana.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledget*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu, untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana pemalsuan surat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

⁶ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

⁷ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:

- **Straf** : pidana dan hukum

- **Baar**: dapat dan boleh

- **Feit** : tidak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁸

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁹ Sedangkan, **Van Hamel** mengatakan bahwa *starfbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

⁸ *Ibid.*, hlm 19.

⁹ Chairul Huda, 2006. "*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*", Kencana, Jakarta, hlm. 27.

¹⁰ *Ibid.*

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

-Definisi teoritis, yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

-Definisi yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.¹²(Zainal, 1995)

2) Unsur- Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dipidanya suatu perbuatan dan si pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam uraian delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab Undang-Undang atau asas hukum yang umumnya diterima. Syarat ini dinamakan **unsur** tindak pidana. Perkataan unsur di sini

¹¹Kertonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm 62.

¹²AndiZainal, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

dipakai dalam arti sempit. Dahulu dan juga sekarang ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan perkataan unsur untuk bagian-bagian dari tindak pidana, seperti diterangkan sebelum ini, dan juga mempergunakannya untuk syarat lain untuk dapat dipidanya suatu perbuatan dan si pelaku. Supaya keadaannya lebih jelas, sebaiknya diadakan perbedaan antara **bagian** dan **unsur**; jadi, mempergunakan perkataan “bagian” hanya jika kita berurusan dengan bagian-bagian dari perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam uraian delik; dan mempergunakan perkataan “unsur” untuk syarat yang diperlukan untuk dapat dipidanya suatu perbuatan dan si pelaku yang muncul dari bagian umum kitab Undang-Undang dan asas hukum umum. Perbedaan antara bagian dan unsur seperti ini diuraikan oleh Vrij dan juga oleh A. Mulder dalam kuliah mereka.¹³

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan

¹³J.M. van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta, Bandung, hlm. 99.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁴

Sedangkan menurut Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul “**Asas-Asas Hukum Pidana**” bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.¹⁵

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).¹⁶

Adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan

¹⁴ Kanter E.Y&S.RSianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerepannya*, StoraGrafika, Jakarta, hlm. 211.

¹⁵ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 28.

¹⁶ Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 10.

didalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan didalam undang-undang. Menurut **Loebby Loqman** terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: *pertama*, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya, *kedua* adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan *ketiga* tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.¹⁷

C. Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang

¹⁷Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, RefikaAditama, Bandung, hlm. 99.

berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.¹⁸

Menurut **Topo Santoso** mengemukakan bahwa¹⁹ :

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

- 1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
- 2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- 3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

Surat menurut Harni Eka Putri dalam skripsinya adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan

¹⁸AdamiChazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

¹⁹TopoSantoso, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 77

memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat.²⁰

Rumusan Pasal 263 (1) KUHP juga menjelaskan sebagai berikut²¹:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- 1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjangkjian sewa, perjanjian jual beli)
- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

²⁰Harni Eka Putri, 2013, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 25.

²¹ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor Politelia, hal 195

Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah bentuk tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh R.Soesilo di dalam KUHP, seperti: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacamnya, akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur didalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu :

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271 KUHP)
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat di dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan pasalnya adalah sebagai berikut :

- A.** Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamanya enam tahun.
- B.** Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Kejahatan pemalsuan yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri dari unsur sebagai berikut :

a) Unsur Objektif

- 1) Barang siapa
- 2) Membuat surat palsu atau memalsukan

- 3) Surat yang menimbulkan hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan utang, atau
- 4) Suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan
- 5) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

b) Unsur Subjektif

Dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur Objektif : 1. Surat palsu
2. Surat yang dipalsukan
- c. Pemakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menurut **Adami Chazawi**²² perbuatan memalsukan surat adalah :

“perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak, ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi”

3) Jenis-Jenis Pemalsuan Surat

Jenis-jenis pemalsuan surat yang termasuk di beberapa Pasal dalam KUHP, sebagai berikut :

²²AdamiChazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, RajaGrafindo, hlm 100.

a. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok

Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 KUHP, secara umum pemalsuan surat yang dimaksud pada pasal tersebut adalah pembuatan surat yang palsu atau memalsukan surat yang penggunaan surat palsu atau yang telah dipalsukan. Surat yang dimaksud ialah :

- 1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual-beli)
- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya kwitansi atau surat semacam itu)
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

b. Pemalsuan surat khusus

Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang dapat dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan, berikut rumusan R. Soesilodalam KUHP, sebagai berikut²³:

- 1) Mengenai surat otentik.
- 2) Mengenai surat utang atau surat tanda utang (certificaat)

²³ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politelia, hal 195

- 3) Mengenai saham-saham (aandeel) atau surat utang atau perserikatan, balai, perseroan, atau maskapai).
- 4) Mengenai talon atau surat tanda untung sero (dividend) atau tanda bunga uang dari satu surat yang diterangkan pada huruf (b) dan (c) atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu.
- 5) Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan.

Perbuatan yang diancam hukuman pada Pasal ini harus memuat segala unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 263 ditambah dengan syarat bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik, dsb. Diancam hukuman pada pasal ini lebih berat dari pemalsuan surat biasa.

c. Pemalsuan akte autentik (dengan isi keterangan palsu)

Pemalsuan akte autentik dengan isi keterangan palsu diatur dalam Pasal 266 KUHP. Akte autentik palsu adalah akte autentik yang isinya tidak berdasarkan kebenaran atau bertentangan dengan kebenaran Moch. Anwar²⁴. Akte autentik terdiri dari :

- 1) Akte notaris
- 2) Akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akte kelahiran dan akte kematian.
- 3) Berita acara dari Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan.

²⁴Moch. Anwar, 1996, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 198.

Yang dihukum berdasarkan Pasal 266 KUHP adalah orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai yang berwenang untuk membuat akte atau surat-surat resmi tertentu. Kemudian, orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar.

d. Pemalsuan surat keterangan dokter

Pemalsuan surat keterangan dokter diatur dalam Pasal 268 KUHP. Perbuatan seseorang tabib atau dokter yang dilarang menurut Pasal tersebut adalah membuat keterangan palsu. Selanjutnya menurut **Moch. Anwar**²⁵ membuat atau menyusun keterangan palsu secara tertulis dan selanjutnya menyerahkan kepada seseorang untuk diserahkan kepada orang yang diperuntukkan atau orang yang telah memintanya. Seorang tabib atau dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan (bukan keterangan lisan) palsu tentang ada atau tidak adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat. Ancaman hukumannya akan ditambah apabila surat keterangan yang palsu itu digunakan guna memalsukan atau menahan orang dalam rumah sakit gila.

e. Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik

Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 269 KUHP, R. Soesilo²⁶ menjabarkan orang-orang yang dikenakan pasal ini sebagai berikut :

²⁵ *Ibid*, hlm.201.

²⁶ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politelia, hlm. 199.

- 1) Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka memberi pertolongan.
- 2) Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepalsuannya.

f. Pemalsuan surat pas jalan

Pemalsuan surat pas jalan diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang menjadi objek pemalsuan dalam pasal tersebut adalah : surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan (jaminan atas kamanan diri), surat perintah jalan. Surat-surat lain yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan izin masuk ke Indonesia tersebut dalam L.N. 1949 No. 331, misalnya : surat izin masuk, paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam.

g. Pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi

Pemalsuan surat pengantar kerbau atau sapi diatur pada Pasal 271 KUHP, Penjelasan R. Soesilo²⁷ dalam KUHP mengenai masalah tersebut adalah :

- 1) Menurut L.N. terakhir tahun 1902 No. 449, maka pembawaan kerbau dan sapi dari satu kawedanan ke kawedanan lain harus

²⁷*Ibid*, hlm.201.

disertai surat pengantar yang dikeluarkan oleh Wadena atau pegawai yang ditunjuk untuk itu.

- 2) Pegawai yang membuat palsu keterangan (surat pengantar) itu dan orang yang dengan sengaja memakai surat pengantar yang dipalsukan itu dapat dikenakan pasal ini.

h. Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri

Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri diatur dalam Pasal 274 KUHP. Penjelasan R. Soesilo²⁸ dalam KUHP mengenai masalah tersebut adalah :

- 1) Surat keterangan yang dibuat palsu atau yang dipalsukan dalam pasal ini ialah terdiri dari, surat keterangan yang dalam prakteknya banyak diberikan oleh para pegawai pamongpraja, termasuk para pamongdesa, kepada penduduk yang akan membawa keluar atau menjual barang-barangnya, untuk menyatakan bahwa barang-barang itu betul milik orang tersebut.
- 2) Pemalsuan surat semacam itu tidak berdasar atas suatu perundang-undangan, akan tetapi oleh masyarakat Indonesia dipandang perlu, guna menghindarkan penahanan barang-barang oleh polisi karena disangka berasal dari kejahatan (pencurian).

²⁸*Ibid*, hlm. 195.

- 3) Pemalsuan surat semacam itu biasanya dilakukan dalam praktek untuk memudahkan penjualan barang-barang yang asalnya gelap atau dari kejahatan.

i. Menyediakan bahan-bahan yang digunakan dalam kejahatan

Menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan diatur dalam Pasal 275 KUHP. Penjelasan R. Soesilo²⁹ dalam KUHP mengenai masalah tersebut adalah :

- 1) Kejahatan yang dimaksud adalah semua yang tertera dalam Pasal 264 nomor (2) sampai (5).
- 2) Menyimpan untuk dapat digunakan oleh si penyimpan masuk dalam pengertian menyediakan.

D. Pidana dan Pemidanaan

1) Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁰ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan

²⁹*Ibid*, hlm. 195.

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³¹

Menurut Satochid Kartanegara bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

1. Jiwa manusia (leven);
2. Keutuhan tubuh manusia (lyf);
3. Kehormatan seseorang (eer);
4. Kesusilaan (zede);
5. Kemerdekaan pribadi (persoonlykevryheid);
6. Harta benda atau kekayaan (vermogen).³²

³¹J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung, hlm. 17.

³²SatochidKartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hlm. 275-276.

2) Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict) maupun pelanggaran (wetsdelict).

a) Kejahatan (rechtsdelict)

Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut wetsdelict (delik undang-undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP)

b) Pelanggaran (wetsdelict)

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut rechtsdelict (delik hukum). Dimuat didalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh: mabuk ditempat umum (pasal 492 KUHP atau 536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP).

3) Teori-Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu

sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³³

a) Teori absolut (teori retributif)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁴

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan

³³DwidjaPriyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. RafikaAditama, Bandung, hlm. 22.

³⁴LedenMarpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.³⁵ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.³⁶ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.³⁷

b) Teori Retributif

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁸

c) Teori relatif (deterrence)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat

³⁵DwidjaPriyanto, *Op. Cit*, hlm. 24.

³⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 90.

³⁷Muladi dan BardaNawawi, *Op. Cit*, hlm. 12.

³⁸ Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh DwidjaPriyanto, *Op. Cit*, hlm. 26.

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.³⁹

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁴⁰

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan

³⁹LedenMarpaung, *Op. Cit*, hlm. 106.

⁴⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 96-97.

melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).⁴¹

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴²

d) Teori gabungan (integratif)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu

⁴¹DwidjaPriyanto, Op. Cit, hlm. 26.

⁴² Karl O.Cristiansen dalam DwidjaPriyanto, *Ibid*.

mengajarkan bahwa penjatuan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴³

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴⁴

e.) Teori treatment

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi

⁴³LedenMarpaung, Op. Cit, hlm. 107.

⁴⁴AdamiChazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 162-163.

baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.⁴⁵

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁴⁶ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi pelaku.

f.) Teori perlindungan sosial (social defence)

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenal Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan

⁴⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 96-97.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 12.

kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁴⁷

Berdasarkan teori-teori pembedaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pembedaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?⁴⁹

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-

⁴⁸Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

⁴⁹LilikMulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 136.

hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.⁵⁰

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:⁵¹

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

- 2) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

- 3) Tahap Penentuan Pidana

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

⁵¹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 96.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁵²

- 1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan

⁵² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah :⁵³

- 1) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

⁵³ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesi*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 204.

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi. Penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Dari itu, penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat” (Studi Kasus Putusan No.684/Pid.B/2016/PN.Mks)”, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan surat tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari karya ilmiah ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang Penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh Penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku dan jurnal hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, maka Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan Penulis menggunakan dua cara yaitu:

- a) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya-jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.
- b) Studi dokumentasi, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum yang tersedia sejak dilakukan proses hukum dalam perkara ini yaitu mulai dari mempelajari dokumen pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier maka data tersebut diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan

dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil

Pengertian Hukum Materil adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu hubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil perhatiannya ditujukan kepada isi peraturan.

Berbicara mengenai hukum pidana materil itu memberi pengaturan mengenai tiga hal pokok yaitu: Perbuatan yang diancam pidana (criminal act); Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility); pidana materil itu sendiri adalah kerugian bersifat fisik/kebendaan (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jadi kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita.

Selanjutnya, untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Berikut ini penulis menguraikan posisi kasus, dakwaan, tuntutan, dan amar putusan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 684/Pid.B/2016/PN. Mks sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias BAHAKING pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Toko Mega Mas Ponsel di jalan Boulevard Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berawal terdakwa MUBARAK mendatangi Toko Mega Mas Ponsel untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5, kemudian M. Nurhusein (karyawan PT. Home Credit Indonesia yang ditempatkan di Toko Mega Mas Ponsel) meminta Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa sebagai syarat untuk mengajukan permohonan kredit, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama AMRAN SULAIMAN dengan nomor NIK 7306082102840009 kemudian M. Nurhusein mengisi blanko aplikasi pengajuan kredit sesuai dengan KTP yang terdakwa serahkan kepadanya dan mengambil foto dan sidik jari terdakwa sebagai calon nasabah untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP atas nama AMRAN SULAIMAN dengan nomor NIK 7306082102840009 yang terdakwa palsukan terlebih dahulu dengan cara mengedit menggunakan program word dan photoshop dengan memakai

identitas secara acak kemudian memasang foto/gambar terdakwa pada KTP lalu mencetak dengan menggunakan kertas ukuran 60 gram lalu melaminatingnya dengan menggunakan plastik tebal sehingga bentuknya menyerupai KTP asli. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2016 terdakwa datang ke Toko Mega Mas Ponsel untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 dengan harga Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara kredit kemudian terdakwa membayar uang muka serta biaya administrasi sebesar Rp. 3.119.000,- (Tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan masa kredit 15 (lima belas) bulan dengan nilai angsuran perbulannya sebesar Rp. 743.600,- (Tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Selanjutnya M. Nurhusein kemudian memproses dan menemukan adanya kesamaan sidik jari pada pinjer print dan ada foto terdakwa dengan sidik jari dan foto customer lain atas nama Haeruddin Ansar kemudian pihak perusahaan mengadakan investigasi dengan cara mendatangi kantor Catatan sipil Kab. Gowa untuk menanyakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP atas nama AMRAN SULAIMAN (calon customer) nomor 7306082102840009 yang terdakwa gunakan untuk mengajukan permohonan kredit dan ternyata NIK tidak terdaftar, sehingga pada saat itu Alamsyah (karyawan yang menjabat sebagai Special Investigation yang bertugas melakukan investigasi dan bekerja pada PT. Home Credit Indonesia) mengamankan terdakwa saat terdakwa keluar dari toko setelah mengambil 1 (satu) buah handphone merk

Samsung Galaxy Note 5 di Toko Mega Mas Ponsel pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK** pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Toko Mega Mas Ponsel di jalan Boulevard Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya member hutang maupun penghapusan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tepat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa **MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK** mendatangi Toko Mega Mas di jalan Boulevard Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5, kemudian saksi M. Nurhusein

(karyawan PT. Home Credit Indonesia yang ditempatkan di Toko Mega Mas Ponsel Ruko Jasper jalan Boulevard Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar) meminta Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa sebagai syarat untuk mengajukan permohonan kredit kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama AMRAN SULAIMAN dengan nomor NIK 7306082102840009 kemudian saksi M. Nurhusein mengisi blangko aplikasi pengajuan kredit sesuai KTP yang terdakwa serahkan kepadanya dan mengambil foto dan sidik jari terdakwa sebagai calon nasabah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMRAN SULAIMAN dengan nomor NIK 7308062102840009 yang terdakwa palsukan terlebih dahulu dengan cara mengedit menggunakan program word dan fotoshop dengan memakai identitas secara acak kemudian memasang foto/gambar terdakwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lalu mencetak dengan menggunakan kertas ukuran 60 gram lalu menglaminatingnya dengan menggunakan plastik tebal sehingga bentuknya menyerupai KTP asli.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2016 terdakwa datang ke Toko Mega Mas Ponsel untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 dengan harga Rp. 9.900.00,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara kredit kemudian terdakwa

membayar uang muka serta biaya administrasi sebesar Rp. 3.119.000,- (Tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan masa kredit 15 (lima belas) bulan dengan nilai angsuran perbulannya sebesar Rp. 743.000,- (Tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Home Credit Indonesia mengalami kerugian sekira Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Toko Mega Mas Ponsel di jalan Boulevard Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah oleh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK mendatangi Toko Mega Mas Ponsel di jalan Boulevard Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk mengajukan kredit 1

(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5, kemudian saksi M. Nurhusein (karyawan PT. Home Credit Indonesia yang ditempatkan di Toko Mega Mas Ponsel jalan Boulevard Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar) meminta Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik terdakwa sebagai syarat untuk mengajukan permohonan kredit kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama AMRAN SULAIMAN dengan nomor NIK 7308062102840009 yang terdakwa palsukan terlebih dahulu dengan cara mengedit menggunakan program word dan fotoshop dengan memakai identitas secara acak kemudian memasang foto/gambar terdakwa pada KTP lalu mencetak dengan menggunakan kertas ukuran 60 gram lalu menglaminatingnya dengan menggunakan plastik tebal sehingga bentuknya menyerupai KTP asli.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2016 terdakwa datang ke Toko Mega Mas Ponsel untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5 dengan harga Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara kredit kemudian terdakwa membayar uang muka serta biaya administrasi sebesar Rp. 3.119.000,- (Tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan masa kredit 15 (lima belas) bulan dengan nilai angsuran perbulannya sebesar Rp. 743.000,- (Tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Home Credit Indonesia mengalami kerugian sekira Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan tersebut di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa yakni : Pertama : Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Oleh karena terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan alternative yakni Kesatu : Pasal Pertama : Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap paling terbukti yakni dakwaan Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum,

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan **MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK**, yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur “Unsur dengan sengaja”.

Menurut memori penjelasan (*Memorie van toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetensveroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *opzetalsorgmerk*, (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *opzetbijzekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*, (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan).⁵⁴

Dalam Dolus, sebab itu terkandung elemen volitief (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui), menghendaki atau berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap sedangkan

⁵⁴ Drs PAFLAMINTANG dan C.DJISMANSAMOSIR, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.202.

dengan mengetahui dapat dipersamakan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Akan tetapi keniscayaan akibat dapat timbul apabila pelaku sebenarnya tidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibat atau situasi yang timbul dari perbuatannya, bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik) namun pada saat yang sama didalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat sebenarnya tidak dikehendaki.⁵⁵ Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzetbijzekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn)

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (doluseventualis)

⁵⁵ JAN RAMELLINK, 2003, Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta, hlm. 152-153

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.⁵⁶

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alamsyah, saksi M. Nurhusein, Amd.KI, saksi Sartika Dewi dan keterangan terdakwa **MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK** bahwa benar terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST Bin ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK, pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 di Toko Mega Mas Ponsel Ruko Jasper untuk mengajukan permohonan kredit atas pembelian 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 kemudian M. Nurhusein, Amd KL dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 7306082102840009 atas nama AMRAN SULAIMAN dan NPWP atas nama AMRAN SULAIMAN yang bukan atas nama terdakwa melainkan KTP atas nama AMRAN SULAIMAN yang terdakwa buat sendiri dengan cara mengedit menggunakan program word dan fotoshop dengan memakai identitas secara acak kemudian memasang foto/gambar terdakwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lalu mencetak dengan menggunakan kertas ukuran 60 gram lalu menglaminatingnya dengan menggunakan plastik tebal sehingga bentuknya menyerupai KTP asli.

⁵⁶ S.R. SIANTURI,SH., 1996, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehem, Jakarta, Hlm.170-175

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah oleh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Sartika Dewi dan keterangan saksi Alamsyah, saksi M. Nurhusein, Amd.KL, saksi Sartika Dewi dan keterangan terdakwa **MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK** bahwa benar terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST Bin ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK, pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 di Toko Mega Mas Ponsel Ruko Jasper di jalan Boulevard Kec. Panakkukang Kota Makassar datang ke Toko Mega Mas Ponsel Ruko Jasper untuk mengajukan permohonan kredit atas pembelian 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 seharga Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian M. Nurhusein, Amd KL meminta identitas terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 7306082102840009 dan NPWP palsu atas nama AMRAN SULAIMAN yang bukan KTP dan NPWP miliknya kepada M. Nurhusein, Amd, KL yang terlebih dahulu terdakwa buat dengan cara mengedit menggunakan program word dan fotoshop dengan memakai identitas secara acak kemudian memasang foto/gambar terdakwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lalu mencetak dengan menggunakan kertas ukuran 60 gram lalu

menglaminingnya dengan menggunakan plastik tebal sehingga bentuknya menyerupai KTP asli.

Bahwa M. Nurhusein, Amd, KL kemudian mengisikan aplikasi pembiayaan kemudian terdakwa menandatangani blangko aplikasi tersebut lalu M. Nurhusein, AMD. KL menghubungi terdakwa untuk memberitahukan terdakwa bahwa pengajuan kredit untuk pembelian handphone yang terdakwa ajukan telah disetujui kemudian terdakwa datang ke Toko Mega Mas Ponsel untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 dan membayar uang muka Rp. 2.970.000,- (Dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar dari dalam toko dan membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 namun terdakwa diamankan oleh saksi Alamsyah.

Dengan demikian unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah oleh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena apa yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut di atas telah terbukti dan telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk lepas dari hukuman dan terhadap diri terdakwa mempunyai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dengan

demikian terhadap terdakwa pantaslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, perkenankanlah kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memeberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. Home Credit Indonesia mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berterus terang, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana menggunakan Surat Palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP atas nama AMRAN SULAIMAN dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar KTP atas nama MUBARAK ABDULLAH, ST dikembalikan kepada MUBARAK ABDULLAH dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 5 dikembalikan kepada ALAMSYAH;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

4. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan memutus:

1. Menyatakan Terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST Bin ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST Bin ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AMRAN SULAIMAN dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama MUBARAK ABDULLAH, ST Bin ABDULLAH BAHAKING Alias MUBARAK dikembalikan kepada MUBARAK ABDULLAH, ST Bin ABDULLAH BAHAKING Alias MUBARAK;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 5 dikembalikan kepada ALAMSYAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh Rika M. Pandegiro, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Cening Budiana, S.H., M.H. dan Ibrahim Palino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husna Machmud, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

5. Analisis Penulis

Penerapan hukum hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Unsur “**barang siapa**”, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini, terdakwa **MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK** telah dihadapkan di depan persidangan yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sah dan meyakinkan.

Unsur “**dengan sengaja**”, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetensveroorzaken van eengevolg) artinya, seseorang yang

melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *opzetalsorgmerk*, (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *opzetbijzekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*, (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan).⁵⁷

Dalam Dolus, sebab itu terkandung elemen volitief (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui), menghendaki atau berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap sedangkan dengan mengetahui dapat dipersamakan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Akan tetapi keniscayaan akibat dapat timbul apabila pelaku sebenarnya tidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibat atau situasi yang timbul dari perbuatannya, bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik) namun pada saat yang sama didalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat sebenarnya tidak

⁵⁷ Drs PAFLAMINTANG dan C.DJISMANSAMOSIR, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.202.

dikehendaki.⁵⁸ Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzetbijzekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn)

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (doluseventualis)

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.⁵⁹

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alamsyah, saksi M. Nurhusein, Amd.KI, saksi Sartika Dewi dan keterangan terdakwa **MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK** bahwa

⁵⁸ JAN RAMELLINK, 2003, Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta, hlm. 152-153

⁵⁹ S.R. SIANTURI,SH., 1996, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehem, Jakarta, Hlm.170-175

benar terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST Bin ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK, pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 di Toko Mega Mas Ponsel Ruko Jasper untuk mengajukan permohonan kredit atas pembelian 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 kemudian M. Nurhusein, Amd KL dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 7306082102840009 atas nama AMRAN SULAIMAN dan NPWP atas nama AMRAN SULAIMAN yang bukan atas nama terdakwa melainkan KTP atas nama AMRAN SULAIMAN yang terdakwa buat sendiri dengan cara mengedit menggunakan program word dan fotoshop dengan memakai identitas secara acak kemudian memasang foto/gambar terdakwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lalu mencetak dengan menggunakan kertas ukuran 60 gram lalu menglaminatingnya dengan menggunakan plastik tebal sehingga bentuknya menyerupai KTP asli. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur “**memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah oleh sehati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**”, bahwa Sartika Dewi dan keterangan saksi Alamsyah, saksi M. Nurhusein, Amd.KL, saksi Sartika Dewi dan keterangan terdakwa **MUBARAK ABDULLAH, ST BIN ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK** bahwa benar terdakwa MUBARAK ABDULLAH, ST Bin ABDULLAH BAHAKING alias MUBARAK, pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 di Toko Mega

Mas Ponsel Ruko Jasper di jalan Boulevard Kec. Panakkukang Kota Makassar datang ke Toko Mega Mas Ponsel Ruko Jasper untuk mengajukan permohonan kredit atas pembelian 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 seharga Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian M. Nurhusein, Amd KL meminta identitas terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 7306082102840009 dan NPWP palsu atas nama AMRAN SULAIMAN yang bukan KTP dan NPWP miliknya kepada M. Nurhusein, Amd, KL yang terlebih dahulu terdakwa buat dengan cara mengedit menggunakan program word dan fotoshop dengan memakai identitas secara acak kemudian memasang foto/gambar terdakwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lalu mencetak dengan menggunakan kertas ukuran 60 gram lalu menglaminatingnya dengan menggunakan plastik tebal sehingga bentuknya menyerupai KTP asli.

Bahwa M. Nurhusein, Amd, KL kemudian mengisikan aplikasi pembiayaan kemudian terdakwa menandatangani blangko aplikasi tersebut lalu M. Nurhusein, AMD. KL menghubungi terdakwa untuk memberitahukan terdakwa bahwa pengajuan kredit untuk pembelian handphone yang terdakwa ajukan telah disetujui kemudian terdakwa datang ke Toko Mega Mas Ponsel untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 dan membayar uang muka Rp. 2.970.000,- (Dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar dari dalam toko dan

membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Note 5 namun terdakwa diamankan oleh saksi Alamsyah. Dengan demikian unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah oleh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Subjek dari Pasal 263 (2) ini adalah “barangsiapa” sedangkan bagian inti delik ini ialah : sengaja, memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Kepentingan yang akan dilindungi ketentuan ini ialah kepentingan umum dan dapatnya terjadi kerugian itu tidak perlu telah terjadi tetapi harus dapat terjadi. Kesulitannya adalah bagaimana dapat membuktikan kerugian itu harus dapat terjadi. Dalam KUHP Indonesia semua delik pemalsuan surat adalah delik sengaja, tidak ada delik kelalaian (culpa). Pemalsuan surat harus diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau dengan surat itu dapat pula timbul hak, suatu perikatan, atau pembebasan utang, dibuat dengan palsu, pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai aslinya (tidak palsu) atau menyuruh orang lain memakainya, dengan pemikiran itu dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang mungkin ditimbulkan berhubungan dengan suatu pemalsuan, berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus kerugian yang bersifat materiilnya melainkan juga apabila kepentingan

dari masyarakat dapat dirugikan, misalnya jika penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan perkara. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat melihat dan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan bahwa terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah bahwa membuat surat palsu atau membuat palsu surat yaitu sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang disebut seperti itu dimaksud dengan surat palsu atau tidak asli. Berbeda dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dasar pertimbangan yang paling utama dan pertama bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi tindak pidana didasarkan pada :

- 1) Dakwaan Jaksa (Penuntut Umum)
- 2) Pertimbangan kedua didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan harus minimal ada 2 dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain :
 - a. Keterangan saksi,
 - b. Keterangan ahli,
 - c. Surat,
 - d. Petunjuk,
 - e. Keterangan terdakwa
- 3) Keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang terdakwa. Keyakinan

ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika Hakim tidak yakin atau ada keraguan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

- 4) Jika seorang terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan Hakim yakin selanjutnya Hakim membuktikan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapusan pidana.
- 5) Hakim juga akan memberikan pertimbangan secara yuridis dalam bentuk putusan Hakim dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dalam perkara ini alat bukti sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yakni keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain itu dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan serta persesuaian antar alat bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi,

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian antara satu sama lain sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Penulis juga berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa sudah tepat, dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) telah terpenuhi dan hakim menjatuhkan hukuman selama 10 (sepuluh) Bulan kepada terdakwa juga sudah tepat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Menurut penulis hukuman tersebut sudah dapat memberikan efek jera. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, tetapi merupakan sarana mendidik terdakwa agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulang lagi perbuatannya dan dapat menjadi seorang warga negara yang baik dimasa yang akan datang.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar hukumannya diringankan dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 297/ EPP.2 / 04 / 2016 tanggal 18 April 2016 yang melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP.
- Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannyadibawah sumpah, yakni saksi ALAMSYAH, saksi M. NURHUSEIN, AMD, KL dan saksi SARTIKA DEWI sebagaimana termuat selengkapny dalam berita acara ;
- Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapny termuat didalam berita acara ;
- Menimbang bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”.
- Menimbang bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada orang lain.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak),

Menimbang bahwa masa tahanan terdakwa harus di perhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-UNdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dari fakta-fakta persidangan yang ada diatas dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ialah hakim telah menjatuhkan putusan yang tepat karena hakim dengan bijak telah mempertimbangan fakta-fakta

persidangan yang ada. Berdasarkan keterangan saksi dipersidangan penulis setuju bahwa terdakwa MUBARAK telah melakukan pemalsuan surat, dengan niat untuk mencoba-coba karena terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pemalsuan surat (KTP) dan berhasil. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan yuridis saja, karena nilai keadilan dan kebenaran tidaklah cukup diukur dengan nilai kerugian, dampak perbuatan maupun kebenaran hukum. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan juga harus melihat unsur non yuridis, seperti faktor ekonomi, sosiologi, psikologis, dan kriminologis yang melatarbelakangi mengapa pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah memalsukan surat sehingga PT. Home Credit Indonesia yang merasa telah dirugikan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada perkara Nomor 684/Pid.B/2016/PN.Mks, yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar. Menjerat terdakwa dengan Pasal 263 (2) KUHP. Sebab semua unsur yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sudah terpenuhi dan saling mencocoki.
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pemalsuan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam

keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

B. Saran

Adapun saran dari penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam KUHP, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus seperti tindak pidana pemalsuan surat penulis harap agar Majelis Hakim lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan lebih memperhatikan dasar hukum yang akan diterapkan kepada terdakwa.
2. Demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum dalam memutus setiap perkara khususnya perkara tindak pidana pemalsuan surat, hakim dan jaksa harus mempertimbangkan dengan baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa agar dalam setiap putusan hakim tidak merugikan terdakwa. Peranan polisi dalam tahap penyidikan dan jaksa dalam menyusun surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu tindak pidana karena surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Andi Zainal, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. Penemuan hukum. Sinar grafika. Jakarta. 2010
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Chairul Huda, 2006. *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”*, Kencana, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung* : PT. RafikaAditama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Drs PAFLAMINTANG, SH dan C.DJISMANSAMOSIR, 1990. *Hukum Pidana Indonesia*, SH., Sinar Baru, Bandung.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan*. Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Bandung : RefikaAditama.
- JAN RAMELLINK, 2003. *Hukum Pidana*, Gramedia Jakarta .
- J.M. van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Kanter E.Y&S.RSianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerepanya*, StoriaGrafika, Jakarta,
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Lilik Mulyadi, 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S.R. SIANTURI, SH, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta.